

**“SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DIKUTI OLEH
CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI”**

**(STUDY KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PATI
TAHUN 2017)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Magister Hukum



Diajukan oleh:

MOH SOFIYAN HADI, S.H.

2016-02-008

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2018

Halaman Persetujuan Sesudah Tesis

**“SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DIKUTI OLEH
CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI”**

Disusun oleh:

**MOH SOFIYAN HADI, S.H.
2016-02-008**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 28 Agustus 2018**

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Dr. Suparno, SH,MS

Pembimbing Pendamping

Dr. Subarkah, SH.,MHum

Anggota Dewan Penguji I

Dr. Hidayatullah, SH.,MHum

Anggota Dewan Penguji II

Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,C.N

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
pada tanggal 28 Agustus 2018**



**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

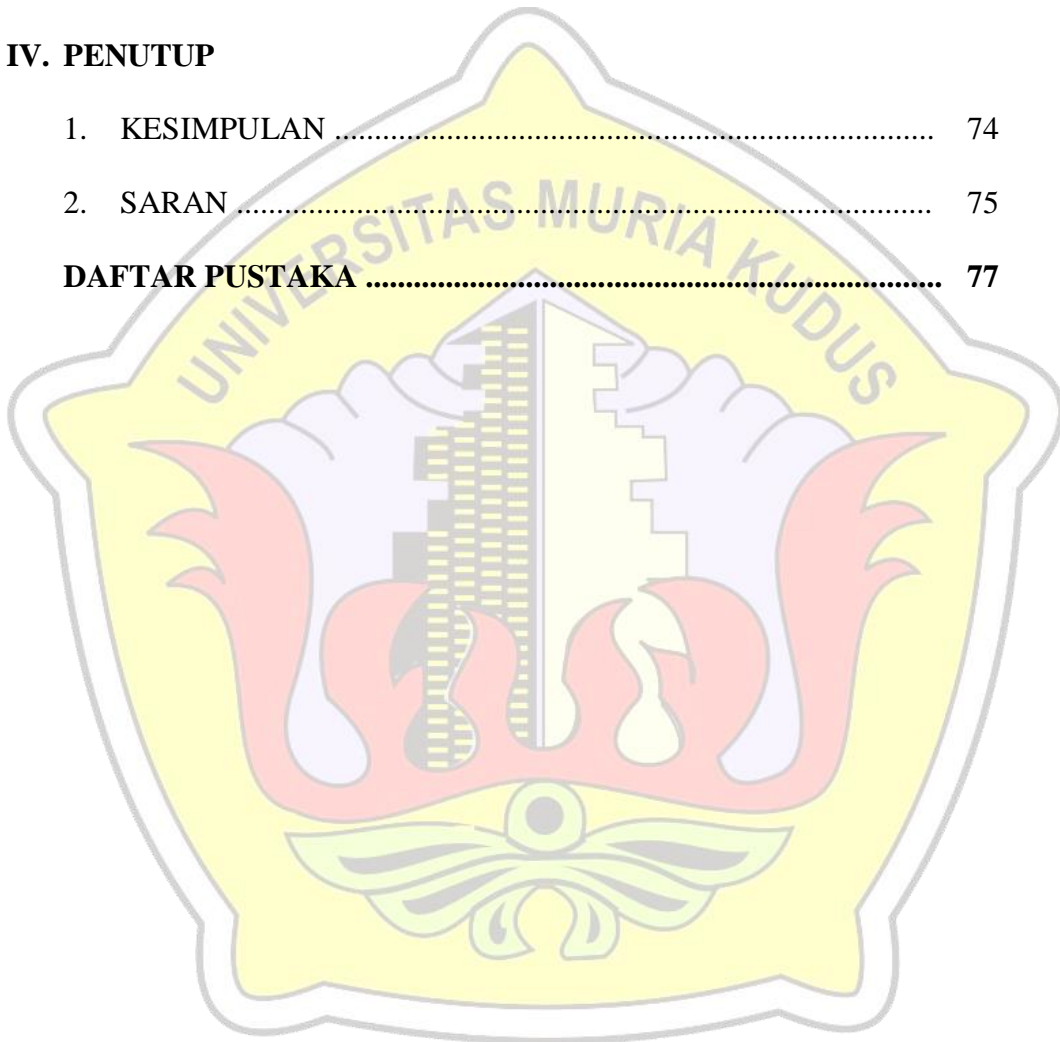
DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK/ ABSTRACT	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH	6
3. TUJUAN PENELITIAN	6
4. METODE PENELITIAN	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Kerangka Konseptual	14
2. Kerangka Teori	16
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
1. Dinamika Politik Kabupaten Pati	26
2. Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik	28

3. Sisi Pragmatisme Munculnya Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017	34
4. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Diikuti Oleh Calon Tunggal Di Kabupaten Pati	42
5. Peran dan Strategi Kotak Kosong dalam Pilkada	64

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN	74
2. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH SOFIYAN HADI, S.H.

NIM : 2016-02-008

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus,.....

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

MOH. SOFYAN HADI, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Adapun judul tesis ini adalah: "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Diikuti Oleh Calon Tunggal Di Kabupaten Pati (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017)". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Dr. Suparno, SH,MS, Dr. Subarkah, SH.,M.Hum., Dr. Hidayatullah, SH.,M.Hum., Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,C.N. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

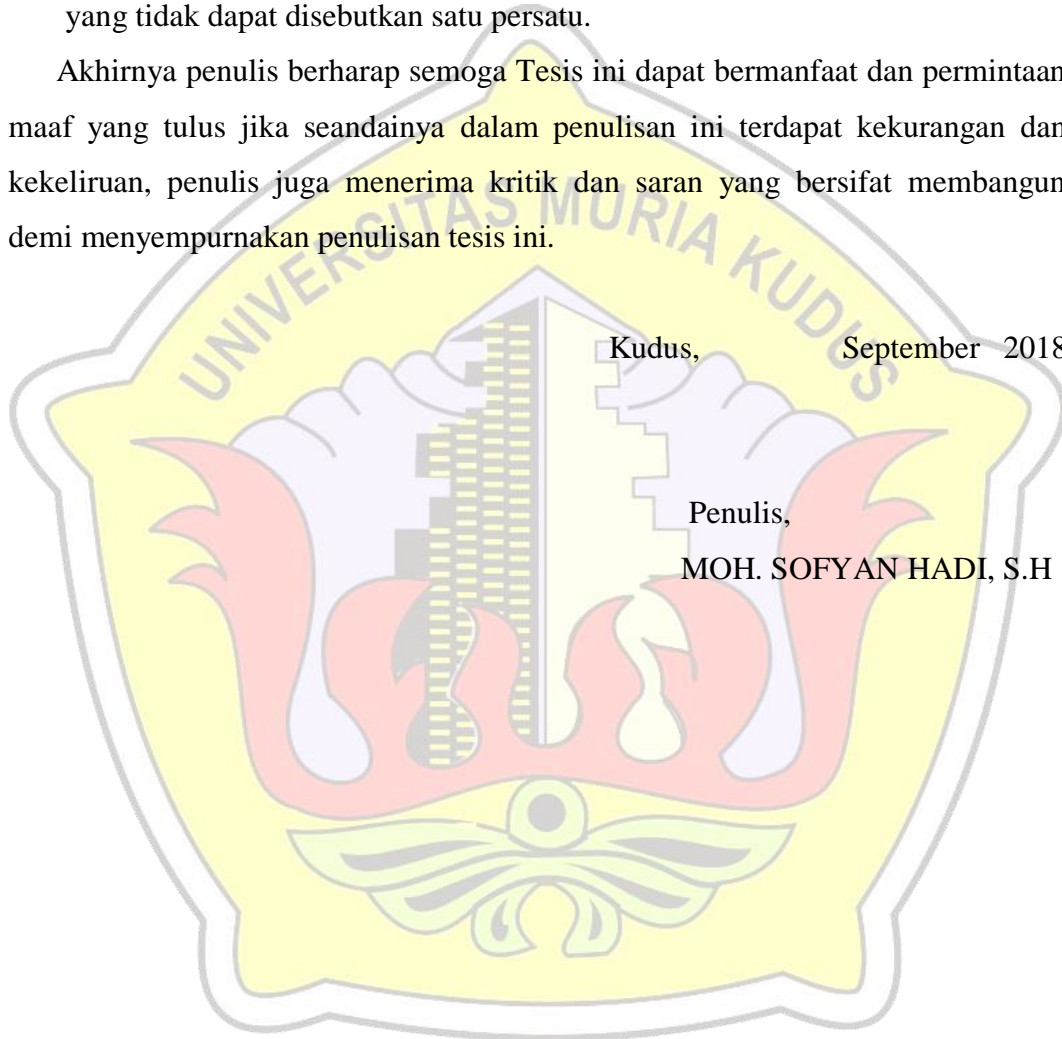
1. Rektor Universitas Muria Kudus, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Dekan Fakultas Hukum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Dr. Suparno, SH,MS., sebagai Pembimbing Utama penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.

5. Dr. Subarkah, S.H.,M.Hum., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting.
6. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Kepada Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Kudus, September 2018

Penulis,
MOH. SOFYAN HADI, S.H



Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap, Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh penyelenggara pilkada guna menjamin dan menyalurkan hak pilih warga Negara dalam memilih kepala daerah secara langsung yakni dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang akhirnya akan dilakukan penetapan calon kepala daerah terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada melalui Surat Keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Pemilihan Kepala daerah untuk memilih pemimpin dengan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Keberlangsungan pemilihan kotak kosong yaitu dengan memilih calon tunggal Bupati dan wakil Bupati. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena suatu kelemahan yang terjadi maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat.

Sengketa pemilihan hasil pemilih (PHP) di Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jundo* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2017 sehingga ditolak di Mahkamah Konstitusi, Tim Advokasi Gerakan masyarakat Pati (GERAM PATI) ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kedaluwarsa, perselisihannya sebanyak 341.913 suara atau 49,02% sedangkan syaratnya seharusnya 0,5% karena penduduk Kabupaten Pati lebih 1.000.000 penduduk, Tim Advokasi Gerakan masyarakat Pati (GERAM PATI) bukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2017, bukan lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU.

Kata kunci: Pilkada Calon Tunggal, Hasil Pilkada Pati, Gugatan MK

Abstract

General Election (Election) is a concrete manifestation of democracy and a means for the people to declare their sovereignty over, the State and the government. In organizing elections there are several stages carried out by the election organizers in order to guarantee and channel the voting rights of citizens in directly electing regional heads, namely in the stage of voting which will ultimately be made the determination of elected regional head candidates by the General Election Commission (KPU) in each region which organizes the election through a Decree concerning the determination of the vote acquisition results.

Election of Regional Heads to elect leaders with direct elections conducted by the people in one area. The continuity of the selection of empty boxes is by selecting a single candidate for the Regent and Deputy Regent. These factors must be identified because of a weakness that occurs so the process does not only stop at the selection of law as a means but a solid knowledge of the nature of the law also needs to be known in order to know the limits in the use of law as a means to change or regulate the behavior of citizens

Disputes over voter election results (PHP) in Pati Regency did not meet the requirements of article 158 paragraph (2) of Law 10/2016 jundo Passal 6 paragraph (2) PMK 1/2017 so that they were rejected by the Constitutional Court, the Pati Movement Advocacy Team (GERAM PATI) when filing with the Constitutional Court also expired, the dispute amounted to 341,913 votes or 49.02% while the conditions should be 0.5% because the population of Pati District was more than 1,000,000 residents, the Pati Movement Movement Advocacy Team (GERAM PATI) were not participants in the election of candidates for Regent and Deputy Regent Pati Regency in 2017, is not a registered election monitoring institution and receives accreditation from the KPU.

Key word: Single Candidate Election, Pati Election Results, MK Lawsuit

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Sistem Rekrutmen Calon Partai Politik Kabupaten Pati dalam Pemilukada 2017	28
Tabel 3.1 Pola Koalisi Partai dalam Pemilukada 2006	34
Tabel 3.2 Pola Koalisi Partai dalam Pemilukada 2011	36
Tabel 3.3 Pola Koalisi Partai dalam Pemungutan Suara Ulang 2012	37
Tabel 3.4. Pola Koalisi Partai dalam Pemilukada 2017	37
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati	42
Tabel 4.2 Delapan Partai	44
Tabel 4.3 Rekapitulasi DPT Per Kecamatan	47
Tabel 4.4 Hasil Pemungutan suara dan Perhitungan Suara	50
Tabel 4.5 Syarat Persetujuan Perselisihan Hasil Pilkada	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Grup Facebook Relawan Kotak Pati	67
Gambar 5.2. Halaman Anggota Grup Facebook Relawan	67
Gambar 5.3. Halaman Anggota Grup Facebook Relawan Kotak Kosong Pati Bumi Mina Tani	68
Gambar 5.4. Suasana Salah Satu Posko Kelompok	69
Gambar 5.5. Suasana Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Tlogoayu	70

